

PRAKTIK POLITIK DALAM SEJARAH ISLAM ERA DINASTI-DINASTI ISLAM

Nurfazillah¹

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

¹Contributor Email: zilaabd24@gmail.com

Abstract

This article focuses discussion on the political practices of the three great dynastic eras in Islamic history. The purpose of this paper is to describe how political practice during the Islamic dynasties in Islamic history. The problems that want to be answered in this paper is: how political practices in that era were carried out for Umayyah, Abbasid, and the Turkish Ottoman dynasty. This journal using qualitative-descriptive methods as a literature research. Based on the results of the study it is found that the political practices in these three dynastic eras were not entirely the same. Even though, they were led by a caliph but in case they have different political practices. For example: the Umayyiah dynasty in the political practice of its government was assisted by diwan. The Abbasid dynasty was guarded by a hajib. There are also wazir and katib as assistants to the caliph in running the wheels of government. And then, the Turkish Ottoman dynasty formed the assembly of syura (mesrevet), mufti and qadhi as his servants.

Keywords: *Praktik Politik, Sejarah Islam, Dinasti Islam*

A. Pendahuluan

Sejarah peradaban Islam telah mencatat bahwa Islam melebarkan sayapnya dengan melakukan ekspansi kenegara-negara lain, yang tujuannya adalah untuk memperkenalkan Islam dan memajukan negara yang telah dikuasai. Dalam sejarah, Islam telah mengalami kemajuan dan kemunduran. Ini dapat dilihat mulai dari masa Nabi Muhammad Saw. dilanjutkan oleh para sahabat, dan kemudian muncul berbagai macam dinasti-dinasti Islam dengan praktek politik yang berbeda-beda, ada yang melanjutkan sebagaimana yang telah dicontohkan dan telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw. di Madinah seperti yang telah dipraktikkan oleh para *Khalifah ar-Rasyidin* (Abu Bakar al-Shiddiq, Umar ibn al-Khattab, Usman ibn 'Affan, dan Ali ibn Abi Thalib), dan ada juga yang terpengaruhi dari sistem pemerintahan negara tetangga seperti yang telah dipraktikkan oleh dinasti Bani Umayyah dalam praktik politiknya. Kemudian, setelah berakhirnya masa kejayaan Bani

Umayyah dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah di Baghdad, dan seterusnya sampai kepada dinasti Turki Usmani di Turki.

Tiga Dinasti besar inilah kiranya yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini. Pada pembahasan selanjutnya akan diuraikan tentang bagaimana awal mula terbentuknya 3 Dinasti besar (Dinasti Bani Umayyah, Dinasti Bani Abbasiyah, dan Dinasti Turki Usmani), berapa lama masa kejayaannya, bagaimana praktik politiknya, dan juga bagaimana akhir dari pemerintahannya (masa kehancurannya) yang tentunya disebabkan oleh berbagai macam persoalan yang dialami oleh masing-masing dinasti, baik itu persoalan internal maupun persoalan eksternal dari masing-masing dinasti tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan. Di mana studi kepustakaan ini mempunyai aktivitas pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengolah berbagai bahan hasil temuan penelitian (Zed, 2004). Studi ini dijalankan dengan bantuan berbagai macam material yang ada dari sumber jurnal, buku, makalah, maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan tema kajian yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu sebagai berikut: Pertama, melakukan penelusuran sumber informasi maupun data dari berbagai sumber, kemudian memilah sesuai dengan kebutuhan data, dan membaca dari berbagai hasil temuan terkait pengelolaan perubahan dalam organisasi secara umum pada bagian pembahasan artikel jurnal maupun buku, serta sumber lainnya yang relevan.

Tahapan kedua, dari hasil penelusuran tersebut dipadukan dengan segala temuan literatur, baik teori, model, maupun konsep pengelolaan perubahan organisasi. Ketiga, menganalisis setiap temuan dari berbagai bacaan. Tahapan terakhir yaitu memberikan pandangan dan gagasan melalui pengembangan dari hasil temuan dari artikel maupun buku sebelumnya terhadap fenomena organisasi saat ini..

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Politik Era Dinasti Bani Umayyah

Masa kepemimpinan Mu'awiyah dimulai pada tahun 41 H/661 M, ketika Hasan melakukan bai'at terhadap Mu'awiyah dan diikuti oleh sebagian umat Islam. Mu'awiyah merupakan seorang administrator ulung dan politikus yang cerdas. Ia memainkan peranannya tersebut dengan merangkul kembali tokoh-tokoh yang pernah dipecat oleh

'Ali. Sebelumnya, ia telah merangkul 'Amr bin 'Ash¹ sebagai mediatornya dalam *tahkim* dengan Ali. Ini merupakan salah satu kelihaihan Mu'awiyah, padahal telah diketahui bahwa sebelumnya pada masa Usman ibn 'Affan berkuasa, 'Amr pernah dipecat dari jabatannya sebagai gubernur Mesir. Mu'awiyah tidak mau mengulangi kecerobohan Usman dan mengangkat 'Amr kembali sebagai gubernur Mesir. Selain itu, Al-Mughirah ibn Syu'bah diangkat menjadi gubernur Kufah dengan tugas khusus menumpas perlawanan pendukung Ali yang masih setia. Ziyad ibn Abihi yang semula mendukung Ali pun dirangkulnya dengan cara menasabkannya dengan ayahnya (Abu Sofyan) dan mengangkatnya sebagai gubernur Basrah.²

Setelah merasa aman, barulah Mu'awiyah mulai melaksanakan kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahannya, yaitu:

1. Membenahi negara, dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan politis dan alasan keamanan. Karena letaknya jauh dari Kufah pusat kaum Syi'ah pendukung Ali, dan jauh dari Hijaz tempat tinggal mayoritas Bani Hasyim dan Bani Umaiyah, sehingga dapat terhindar dari konflik yang lebih tajam antara dua Bani itu dalam memperebutkan kekuasaan. Lebih dari itu, Damaskus yang terletak diwilayah Syam (Suria) adalah daerah yang berada dibawah genggamannya pengaruh Muawiyah selama 20 tahun sejak ia diangkat menjadi Gubernur di Distrik sejak zaman khalifah Umar Bin Khattab.³
2. Membangun kekuatan militer yang terdiri dari tiga angkatan darat, laut, dan kepolisian yang tangguh dan loyal. Mereka diberi gaji yang cukup dua kali lebih besar dari pada yang diberikan Umar kepada tentaranya. Ketiga angkatan ini bertugas menjamin stabilitas keamanan dalam negeri dan mendukung kebijaksanaan politik luar negeri yaitu memperluas wilayah kekuasaan.
3. Meneruskan perluasan wilayah kekuasaan Islam baik ketimur maupun kebarat. Perluasan wilayah ini di teruskan oleh para penerus Mu'awiyah, seperti khalifah

¹Amr ibn al-Ash adalah diplomat ulung yang tenaga dan pikirannya sangat dibutuhkan oleh Mu'awiyah dalam menjalankan pemerintahannya.

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 90.

³Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h. 42.

Abdul Malik ketimur, Khalifah Al Walid kebarat, dan ke Prancis dizaman khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Perluasan wilayah dizaman dinasti ini merupakan ekspansi besar setelah dizaman Umar. Daerah-daerah yang dikuasai umat Islam pada zaman ini adalah Spanyol, Afrika Utara, Suria, Palestina, Semenanjung Arabia, Irak, sebagian dari Asia kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Rurkmania, Uzbek, dan Kirgis di Asia tengah dan pulau-pulau yang terdapat dilaut tengah. Sehingga dinasti ini berhasil membangun negara besar dizaman itu. Bersatunya berbagai suku bangsa dibawah naungan Islam melahirkan benih-benih peradaban baru yang bercorak Islam sekalipun Bani Umayyah lebih memusatkan perhatiannya kepada pengembangan kebudayaan arab. Benih-benih peradaban baru itu kelak berkembang pesat dizaman dinasti Abbasiyah sehingga dunia Islam menjadi pusat peradaban dunia selama berabad-abad.

4. Muawiyah maupun penggantinya membuat kebijaksanaan yang berbeda dari zaman Khulafaur Rasyidin. Mereka merekrut orang-orang non-muslim sebagai pejabat-pejabat dalam pemerintahan, seperti penasehat, administrator, dokter, dan kesatuan-kesatuan tentara. Tetapi dizaman khalifah Umar Bin Abdul Aziz kebijaksanaan itu di hapuskan. Karena orang-orang non-muslim yang memperoleh *privilege* didalam pemerintahan banyak merugikan kepentingan umat Islam bahkan menganggap rendah mereka. Didalam Alqur'an memang terdapat peringatan-peringatan yang tidak membolehkan orang-orang Mukmin merekrut orang-orang Non-Muslim sebagai teman kepercayaan didalam mengatur urusan orang-orang mukmin, tetapi ada ayat-ayat lain yang membolehkannya.⁴
5. Selain perluasan kekuasaan, Mu'awiyah juga melakukan berbagai penyempurnaan di bidang administrasi negara (birokrasi), perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. Dalam bidang administrasi negara, Mu'awiyah memperkenalkan lembaga pengawal pribadi (*hajib*) dalam sistem pemerintahan. Mu'awiyah mendapat inspirasi pelembagaan hajib ini dari pengaruh Syam dan Persia, juga dari tragedi sebelumnya, yaitu tragedi terbunuhnya Ali.
6. Kebijakan dan keputusan lain yang dibuat oleh Mu'awiyah adalah dengan mengubah sistem pemerintahan dari khilafah yang bercorak Demokratis (*syura*)

⁴Badri, *Sejarah*, h. 42.

menjadi sistem monarki (penunjukan). Berbeda dengan empat khalifah sebelumnya, Mu'awiyah tidak menyerahkan masalah ini kepada umat Islam, tetapi menunjuk putranya Yazid menjadi penggantinya. Ini mengawali corak monarki dalam pemerintahan Islam yang berlangsung hingga awal abad ke 20 M.⁵

Struktur pemerintahan pusat pada masa Mu'awiyah terdiri dari:

1. *Diwan al-Jund* (mengurus tentang militer),
2. *Diwan al-kharaj* (mengurus tentang perpajakan dan keuangan),
3. *Diwan al-Rasa'il* (mengurus surat menyurat),
4. *Diwan al-Khatam* (mengurus bagian arsip dan dokumentasi negara),
5. *Diwan al-Barid* (layanan pos dan registrasi penduduk).

Dalam pemerintahan daerah⁶, wilayah kekuasaan Bani Umayyah dibagi menjadi:

1. Hijaz, Yaman dan Arabia,
2. Mesir bagian utara dan selatan,
3. Irak dan Persia,
4. Mesopotamia, Armenia, dan Azarbaijan, dan
5. Afrika Utara, Spanyol, Prancis bagian selatan, Sisilia, dan Sardinia.

Dalam perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintahan Bani Umayyah juga mencatat perkembangan yang pesat. Pada masa Abdul Malik ibn Marwan (65-85 H/684-705 M) alat tukar mata uang Bizantium dan Persia yang berlaku sebelumnya diganti dengan mata uang yang dibuat sendiri dan memakai bahasa Arab. Pada masa al-Walid (86-96 H/705-714 H) Bani Umayyah mengalami puncak kemakmuran, ia memberi jaminan hidup untuk anak yatim dan orang cacat dan menyediakan pendidikan buat mereka.

Hal yang sangat penting dalam menunjang pendapatan negara pada masa Bani Umayyah yaitu dengan zakat dari umat Islam, harta *ghanimah*, pajak atas tanah dari warga non-Muslim, pajak perdagangan, dan pajak kepala warga non-Muslim. Sumber keuangan tersebut digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil pendapatan ini Mu'awiyah membangun kembali armada angkatan laut yang

⁵Iqbal, *Fiqh*, h. 90-91.

⁶Tiap-tiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang bertugas menjalankan administrasi politik dan militer untuk wilayah masing-masing.

sebelumnya sudah mati akibat perang antara Bizantium dan Persia. Untuk kesejahteraan penduduk, Mu'awiyah memberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan menurut jasa dan keutamaan mereka.⁷

Semasa kekuasaan Umayyah, ketatalaksanaan peradilan makin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Dalam menangani perkara, para hakim tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan politik penguasa negara. Mereka bebas dalam mengambil keputusan, dan keputusan mereka juga berlaku terhadap para pejabat tinggi negara. Badan peradilan *mazhalim* dibentuk sebagai pengaduan masyarakat terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, termasuk hakim. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kepala negara yang kedelapan dari dinasti Umayyah menentukan lima keharusan bagi para hakim, yaitu:

- a) Harus tau apa yang telah terjadi sebelum dia,
- b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi,
- c) Tidak mempunyai rasa dendam,
- d) Harus mengikuti jejak para imam,
- e) Harus mengikut sertakan para ahli dan cerdik pandai.⁸

Nama-nama khalifah pada masa Bani Umayyah:

1. Mu'awiyah bin Abi Sofyan, (41 H / 661 M s/d 60 H / 681 M)
2. Yazid bin Mu'awiyah, (60 H / 681 M s/d 64 H / 683 M)
3. Mu'awiyah bin Yazid, (64 H / 683 M s/d 64 H / 684 M)
4. Marwan bin Hakam, (64 H / 684 M s/d 65 H / 685 M)
5. Abdul Malik bin Marwan, (65 H / 685 M s/d 86 H / 705 M)
6. Walid bin Abdul Malik, (86 H / 705 M s/d 96 H / 715 M)
7. Sulaiman bin Abdul Malik, (96 H / 715 s/d M 99 H / 717 M)
8. Umar bin Abdul Aziz, (99 H / 717 M s/d 101 H / 720 M)
9. Yazid bin Abdul Malik, (101 H / 720 M s/d 105 H / 724 M)
10. Hisyam bin Abdul Malik, (105 H / 724 M s/d 125 H / 743 M)
11. Walid bin Yazid, (125 H / 743 M s/d 126 H / 744 M)
12. Yazid bin Walid, (126 H / 744 M s/d 126 H / 744 M)
13. Ibrahim bin Yazid, (126 H / 744 M s/d 127 H / 744 M)
14. Marwan bin Muhammad, (127 H / 745 s/d M 132 H / 750 M)⁹

⁷Iqbal, *Fiqh*, h. 95.

⁸Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 39.

Akhirnya, setelah berjaya dalam kekuasaannya selama seratus tahun, pada 759 M dinasti Bani Umayyah hancur digantikan oleh Bani Abbas. Faktor-faktor kehancurannya yaitu:

1. Bani Umayyah dari pertama telah menetapkan platformnya sebagai negara sekuler, sehingga perhatiannya terhadap perkembangan keagamaan lebih kecil dibandingkan dengan upaya perluasan kekuasaan. Ini menjadi akibat ketidaksenangan masyarakat terhadap Bani Umayyah.
2. Sistem suksesi berdasarkan warisan.
3. Politik diskriminatif kerajaan terhadap non-Arab (*mawali*).¹⁰

2. Praktik Politik Era Dinasti Bani Abbas

Menjelang akhir Daulah Umayyah 1, terjadi bermacam-macam kekacauan yang disebabkan oleh penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan bani Hasyim, merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan, dan pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan cara terang-terangan. Oleh sebab itu, Bani Hasyim mencari jalan keluar dengan mendirikan gerakan rahasia yang terdiri dari keturunan Ali (Alawiyin) pemimpinnya Abu Salamah, keturunan Abbas (Abbasiyah) pemimpinnya Ibrahim al-Iman, dan keturunan bangsa Persia pemimpinnya Abu Muslim al-Khurasany, yang bertujuan untuk menumbangkan daulah Umayyah. Mereka memusatkan kegiatannya di Khurasan.¹¹ Bani Abbasiyah meraih kekuasaan setelah memenangkan perang sipil ketiga (744-750) dan menjadi pahlawan keadilan Islam melawan Bani Umayyah yang korup.¹²

Pada tahun 132 H/750 M tumbanglah daulah Umayyah dengan terbunuhnya Marwan ibn Muhammad, khalifah terakhir. Maka berdirilah daulah Abbasiyah dengan diangkatnya khalifah pertama Abdullah ibn Muhammad, dengan gelar Abu al-Abbas al-

⁹A. Syalabi, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam 2*, (Jakarta : Al-Husna Zikra, 1995), h. 29.

¹⁰Iqbal, *Fiqh*, h. 96.

¹¹Musyirah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 47.

¹²Antony Black, *The History Of Islamic Political Thought: From The Prophet To The Present*, terj. Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 53.

Saffah pada tahun 132-136 H/750-754 M.¹³ Pemimpin mereka, Abu al-Abbas al-Saffah (m. 750-754) mengaku sebagai keturunan paman Muhammad, mereka meminta rakyat untuk memberikan kesetiaan kepada keluarga langsung Nabi. Dukungan pertama yang mereka peroleh adalah dari Khurasan (Iran Timur), disana mereka dikenal sebagai pemilik daulah (yaitu dinasti yang telah ditakdirkan Tuhan).¹⁴

Dasar-dasar pemerintahan daulat Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas dan Abu Ja'far al-Manshur, tetapi puncak keemasan dari dinasti ini berada pada tujuh khalifah sesudahnya, yaitu al-Mahdi (775-785 M), al-Hadi (785-786 M), Harun al-Rasyid (786-809 M), al-Ma'mun (813-833 M), al-Mu'tashim (833-842 M), al-Wasiq (842- 847 M), dan al-Mutawakkil (847-861 M). Pada masa al-Mahdi perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan disektor pertanian, melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga dan besi.¹⁵

Kejayaan Daulah Bani Abbas terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid (170-193 H/78-809 M) dan anaknya Al-Makmun (198-218 H/ 813-833 M). ketika Ar-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin walaupun ada juga pemberontakan dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga ke India. Pada masanya hidup para filosof, pujangga, ahli baca Alquran dan para ulama dibidang agama.¹⁶

Dari semua khalifah Abbasiyah, al-Makmun (m. 813-833) tampil sebagai khalifah yang paling gigih berusaha mewujudkan kerajaan yang ideal. Ia berkeinginan agar kekhalifahan mandiri dari pengaruh tentara dan dari para pemimpin agama populer dengan cara memikat hati dan pikiran rakyatnya secara langsung. Ia mengadopsi sebuah kebijakan kultural yang dirancang untuk meningkatkan tatanan budaya tinggi dan standar intelektualitas yang luhur. Secara konsisten ia menentang pengaruh para perawi dan ulama yang berbasis rakyat. Ia bergabung dengan aliran-aliran pemikiran yang karena berbagai alasan menentang gaya pemikiran harfiah, yaitu kalangan para teolog yang

¹³Musyirah, *Sejarah*, h. 47.

¹⁴Antony, *The History*, h. 53.

¹⁵Nurlaelah Abbas, *Pemikiran Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyah*, Jurnal Tabligh Edisi Juni 2016 : 68 - 83. h. 7.

¹⁶Ali Mufrodi, *Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 102.

notabene berseberangan dengan para fukaha, para filsuf Hellenis, dan kalangan Syi'ah. Dengan cara demikian ia berharap bisa meningkatkan otoritas khalifah.¹⁷

Politik yang dijalankan oleh daulah Abbasiyah:

1. Kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh khalifah yang mempertahankan keturunan Arab murni dibantu oleh Wazir, menteri, gubernur dan para panglima beserta pegawai-pegawai yang berasal dan berbagai bangsa dan pada masa ini yang sedang banyak diangkat dari golongan Mawali turunan Persia.¹⁸
2. Kebijakan terpenting yang dilakukan al-Manshur adalah memindahkan ibu kota kerajaan ke Baghdad pada tahun 145 H/762 M. Pada mulanya, pusat pemerintahan Abbasiyah adalah di Kufah. Namun karena kota ini kurang aman, karena Kufah adalah basis pendukung Syi'ah yang sangat pro Ali, kemudian al-Saffah memindahkannya ke Hasyimiyah, dekat Kufah. Namun disini juga masih dirasa kurang aman, sehingga pada al-Manshur, ibu kota dipindahkan ke Baghdad.¹⁹ Kota Baghdad sebagai ibukota negara, menjadi pusat kegiatan politik, sosial dan kebudayaan, juga pusat ilmu pengetahuan dijadikan sebagai kota internasional yang terbuka untuk semua negara, bangsa dan keyakinan sehingga terkumpul disana bangsa-bangsa Arab, Turki, Persia, Romawi, Qibthi, Hindu, Barbari, Kurdi dan sebagainya.
3. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Para khalifah dan para pembesar lainnya membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah sendiri pada umumnya adalah ulama yang mencintai ilmu, menghormati sarjana dan memuliakan pujangga. Sebagai bentuk apresiasi kepada ilmu pengetahuan, khalifah berani membayar mahal kepada ilmuwan-ilmuwan yang berhasil menerjemahkan buku-buku dari bahasa asing kedalam bahasa Arab, seperti dari bahasa Yunani dan lain-lain.
4. Kebebasan berpikir diakui sepenuhnya. Pada waktu itu akal dan pikiran dibebaskan benar-benar dari belenggu taqlid, hal mana menyebabkan orang sangat leluasa mengeluarkan pendapat dalam segala bidang termasuk bidang aqidah, filsafat, ibadah, dan sebagainya.
5. Para menteri turunan Persia diberi hak penuh dalam menjalankan pemerintahan sehingga mereka memegang peranan penting dalam membina tamaddun Islam.

¹⁷Antony, *The History*, h. 65-66.

¹⁸Musyirah, *Sejarah*, h. 50.

¹⁹Iqbal, *Fiqh*, h. 98

Mereka sangat mencintai ilmu dan mengorbankan kekayaannya untuk meningkatkan kecerdasan rakyat dan memajukan ilmu pengetahuan.²⁰

Sistem pemerintahan yang dikembangkan Bani Abbas merupakan pengembangan dari bentuk yang sudah dilaksanakan sebelumnya, Bani Abbas mengembangkan sistem pemerintahan dengan mengacu pada empat aspek, yaitu:

1. Aspek Khilafah

Berbeda dengan pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbas menyatukan kekuasaan agama dan politik. Perhatian mereka terhadap agama tentu tidak terlepas dari pertimbangan politis, yaitu untuk memperkuat posisi dan melegitimasi kekuasaan mereka terhadap rakyat. Pemanfaatan bahasa agama dalam pemerintahan ini terlihat dalam pernyataan al-Manshur bahwa dirinya adalah wakil Allah di bumi-Nya (*Zhill Allah fi al-Ardh*), pernyataan al-Manshur ini menunjukkan bahwa khalifah memerintah berdasarkan mandat Tuhan, bukan pilihan rakyat. Oleh karenanya, kekuasaannya adalah suci dan mutlak serta harus dipatuhi oleh umat, karena khalifah berkuasa dalam masalah politik kenegaraan dan agama sekaligus. Para khalifah Bani Abbas akhirnya mengklaim diri mereka sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi (*the shadow of God on the Earth*) dan khalifah Tuhan, bukan khalifah Nabi. Berdasarkan prinsip ini, kekuasaan khalifah bersifat absolut dan tidak boleh digantikan kecuali setelah ia meninggal.

Absolutisme kekuasaan khalifah ini didukung juga oleh beberapa ulama Sunni yang hidup pada masa Daulat Bani Abbas, seperti: Ibn Abi Rabi', al-Mawardi, al-Ghazali, dan Ibn Taimiyah. Mereka mendukung gagasan kekuasaan mutlak khalifah dan sakralnya kedudukan mereka.²¹

2. Aspek *Wizarah*

Wizarah adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala negara. Orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan tersebut dinamakan wazir. Sebelum masa Bani Abbas, wizarah memang sudah ada, namun belum terlembaga. Pada masa Bani Abbas, di bawah pengaruh kebudayaan Persia, wazir ini mulai dilembagakan. Dalam pemerintahan al-Saffah, wazir yang diangkatnya adalah Abu Salamah al-Khallal ibn Sulaiman al-Hamadzani. Wazir bertugas sebagai tangan kanan

²⁰Musyirah, *Sejarah*, h. 50-52.

²¹Iqbal, *Fiqh*, h. 98.

khalifah. Dia menjalankan urusan-urusan kenegaraan atas nama khalifah. Dia berhak mengangkat dan memecat pegawai pemerintahan, kepala daerah bahkan hakim. Wazir juga berperan mengoordinasikan departemen-departemen (*Diwan*), seperti Departemen Perpajakan (*Diwan al-Kharaj*), Departemen Pertahanan (*Diwan al-Jaisy*), dan Departemen Keuangan (*Diwan Bayt al-Mal*).²²

Ahli tata Negara pada masa itu, al-Mawardi membagi wazir menjadi dua bentuk, yaitu: *Pertama; wazir al-tafwidh*, yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen. Atau dapat juga wazir ini dikatakan Perdana Menteri. *Kedua: wazir at-tanfidz*, yaitu wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan yang digariskan oleh wazir tafwidh. Ia tidak berwenang menentukan kebijaksanaan sendiri.²³

3. Aspek Kitabah

Pada masa Bani Abbas berkuasa, juga diangkat katib-katib oleh wazir untuk membantu wazir dalam pemerintahan, ini disebabkan karena besarnya pengaruh wazir pada masa itu, sehingga wazir membutuhkan tenaga-tenaga untuk membantu tugas-tugasnya dalam mengkoordinasi masing-masing departemen. Di antara jabatan katib ini yaitu: *katib al-rasa'il* (asisten pribadi), *katib al-kharaj* (pajak), *katib al-jund* (militer), *katib al-syurthah*, dan *katib al-qadhi* (hakim).

4. Aspek Hijabah

Hijabah berarti pembatas atau penghalang. Dalam sistem pemerintahan Bani Abbas, *hajib* (petugas hijab) berarti pengawal khalifah, karena tugas dan wewenang mereka adalah menghalangi dan membatasi agar tidak semua orang bebas bertemu dengan Khalifah Bani Abbas. Mereka bertugas menjaga keselamatan dan keamanan Khalifah.²⁴

Selain itu, untuk urusan daerah (provinsi), khalifah Bani Abbas mengangkat kepala daerah (*amir*) sebagai pembantu mereka dalam pemerintahan. Ketika mereka masih kuat, sistem pemerintahan bersifat sentralistik. Semua kepala daerah bertanggung jawab kepada khalifah yang diwakili oleh wazir. Namun setelah kekuasaan pusat lemah, masing-masing

²²Iqbal, *Fiqh*, h. 100.

²³Iqbal, *Fiqh*, h. 100.

²⁴Iqbal, *Fiqh*, h. 102.

amir berkuasa penuh mengatur pemerintahannya sendiri, sehingga banyak daerah melepaskan diri dan mendirikan dinasti-dinasti kecil.

Kebijakan lain yang dibuat pada masa Bani Abbasiyah yaitu: pada masa al-Saffah, daerah kekuasaan Bani Abbas dibagi menjadi dua belas provinsi. Bani Abbas juga membentuk lembaga peradilan militer (*Qadhi al-'Askar* atau *qadhi al-Jund*). Khalifah sendiri juga menyediakan waktu-waktu tertentu di istana untuk menangani perkara-perkara khusus. Dalam bidang perekonomian, sumber pendapatan terbesar Negara berasal dari pajak. Penghasilan dari pajak, selain untuk kepentingan masyarakat luas, dibelanjakan juga untuk membayar gaji pegawai tiap-tiap departemen. Selain dari pajak, sumber pendapatan Negara lainnya adalah pertanian, perdagangan, dan industri. Untuk mendukung sektor ini, Khalifah membangun jembatan, irigasi dan memanfaatkan pupuk. Pemerintah pada waktu itu juga mendirikan sekolah pertanian.²⁵

Dinasti Abbasiyah, adidaya tunggal dizamannya mampu bertahan sampai pertengahan abad ke 13. Dunia Islam kemudian kehilangan unsur terpenting eksistensinya, yaitu kesatuan atau integritas. Berbagai penyebab dapat dideteksi, salah satunya yaitu tekanan yang semakin intens dari berbagai dinasti lain.²⁶ Sebab-sebab lain kemunduran Abbasiyah yaitu karena gaya hidup mewah yang terjadi pada para khalifah Abbasiyah dan keluarganya serta pejabatnya karena harta kekayaan yang melimpah dari hasil wilayah yang luas, ditambah lagi dengan industri olahan yang melimpah dan tanah yang subur serta pendapatan pajak dari pelabuhan-pelabuhan yang menghubungkan antara dunia Barat dan Timur. Kondisi tersebut diperburuk oleh lemahnya para khalifah, sehingga mereka berada di bawah pengaruh para pengawalnya yang menguasai keadaan yang terdiri dari orang-orang Turki. Di samping itu, adanya dinasti-dinasti yang memerdekakan diri terhadap pemerintahan pusat (Baghdad). Bahkan dinasti-dinasti seperti Bani Umayyah di Spanyol dan Fatimiyah di Afrika Utara dan Mesir menjadi saingan Abbasiyah. Serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Salib ke Palestina

²⁵Iqbal, *Fiqh*, h. 105.

²⁶Hasan Asari, *Modernisasi Islam: Tokoh, Gagasan dan Gerakan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2002), h. 23.

yang berjalan begitu lama dengan jatuh dan banggunya pasukan Muslim memperlemah kekuasaan bani Abbasiyah juga.²⁷

Proses kehancuran Abbasiyah Baghdad mencapai klimaksnya pada tahun 1258 M ketika pasukan Mongol dibawah komando Hulagu Khan menyerbu dan menguasai Baghdad. Riwayat khilafah Abbasiyah dikubur bersama mayat khalifahnya yang terakhir, yaitu al-Mu'tashim. Meskipun kekuatan riil khalifah telah berkurang drastis sejak lama, kehilangan lembaga khalifah ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap umat Islam. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa penguasa lokal membutuhkan konfirmasi moral-religius dari khalifah, meskipun mungkin mereka memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang lebih besar.²⁸

3. Praktik Politik Era Dinasti Turki Usmani

Kerajaan Turki Usmani telah muncul dalam periode yang biasanya disebut periode Mongol. Negara bagian yang dipimpin oleh Osman. Pendiri dinasti di akhir abad ke 13, pada awalnya hanyalah salah satu bagian terkecil dari pemerintahan Tuskish dari Anatolia. Militer di Balkan berhasil membuka jalan kekuasaan di Asia Kecil, penaklukan Konstantinopel (1453 M), berakhirnya Kerajaan Bizantium, penaklukan Syria dan Mesir (1516-1517 M), berakhirnya kekuasaan Mamluk adalah fase dimana Utsmani memunculkan kekuasaan di Timur Dekat, kekuasaan yang merangkum seluruh daerah Arab klasik-kebudayaan Islam.²⁹

Kerajaan Turki Usmani didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, yang termasuk suku Kayi. Ketika bangsa Mongol menyerang dunia Islam, pemimpin suku Kayi, Sulaiman Syah mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol tersebut dan lari ke arah barat. Kerajaan Turki Usmani muncul di saat Islam berada dalam era kemunduran pertama. Berawal dari kerajaan kecil, lalu mengalami perkembangan pesat, dan akhirnya sempat diakui sebagai negara adikuasa pada masanya dengan wilayah kekuasaan yang meliputi bagian utara Afrika, bagian barat Asia dan Eropa bagian Timur.³⁰

²⁷Ali Mufrodi, *Islam*, h. 105-106.

²⁸Hasan Asari, *Modernisasi*, h. 23.

²⁹Rusydi Sulaiman, *Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 274.

³⁰Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), h. 82.

Sebelum menjadi sebuah pemerintahan, Kerajaan Turki berbentuk republik, dipimpin oleh seorang Sultan yang absolut. Kekuasaan absolut Sultan ini menghilangkan kebebasan berpikir, mengabaikan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), dan sekaligus membawa kejatuhan terhadap ekonomi. Inilah salah satu penyebab kemunduran dunia Islam khususnya di Turki Usmani. Mustafa Kemal Attaturk (1881), seorang militer yang juga berpendidikan Barat kelahiran Turki, bangkit, kemudian melakukan gerakan dan perubahan politik. Baginya, pemerintahan konstitusional yang berbentuk Republik adalah sebuah keharusan. Sebab, suatu negara atau pemerintahan akan maju apabila negara tersebut melaksanakan sistem pemerintahan konstitusional dan meninggalkan sistem pemerintahan absolut. Negara-negara Eropa maju karena di sana tidak terdapat lagi pemerintahan absolut. Karena Turki termasuk keluarga negara-negara Eropa, maka negeri ini harus mempunyai sistem pemerintahan konstitusional yang Republik.³¹

Puncak kejayaan Dinasti Usmani terjadi pada 1453-1566. Wilayah-wilayah Eropa direbut. Bahkan, Muhammad al-Fatih (1451-1481) berhasil menaklukkan konstantinopel pada 1453. Padahal kota ini terkenal sangat kuat karena dibentengi tiga lapis dinding tebal. Setelah penaklukan Konstantinopel, al-Fatih masih melanjutkan penyerangan dan menguasai Semenanjung Maura, Serbia, Albania sampai perbatasan Bundukia.³²

a. Sistem Pemerintahan Turki Usmani

Dalam pelaksanaan pemerintah, penguasa imperium usmani bergelar Sultan dan Khalifah. Sultan ialah gelar mereka untuk masalah-masalah duniawi, sedangkan Khalifah gelar untuk urusan keagamaan. Sistem pemerintahan Usmani banyak mengadopsi praktik kenegaraan yang berlaku di Bizantium dan Persia. Dalam menjalankan kedua fungsi ini, penguasa usmani dibantu oleh tiga kekuasaan, yaitu: administrasi birokrasi (*Men Of The Pen*), militer (*Men Of The Sword*), dan kekuasaan agama (*Men Of Religion*).

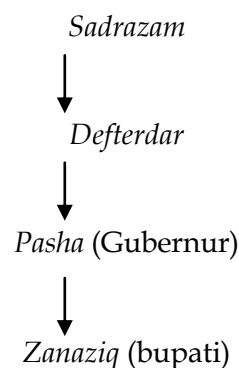
Pada masa kekuasaan Sultan Salim III (1789-1808), ketika Usmani memasuki fase reformasi tradisional, dibentuklah lembaga permusyawaratan baru (*mesrevet*) yang beranggotakan pejabat-pejabat penting negara. Dalam lembaga ini mereka membicarakan masalah-masalah yang terjadi di imperium Usmani dan mencarikan jalan keluarnya. Pada

³¹Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. ke-12, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 106.

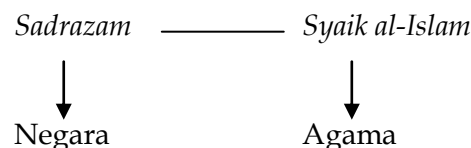
³²Iqbal, *Fiqh*, h. 109.

masa ini kekuatan-kekuatan politik dalam pemerintahan Usmani sudah berfungsi membatasi kekuasaan sultan. Kekuatan politik tersebut, antara lain kalangan ulama dan para bangsawan lokal (*'ayan* dan *bey*). Mereka memiliki otonomi yang luas dalam pemerintahan daerah dan dapat membatasi kekuasaan Sultan.³³

Pada masa Usmani, ada istilah *defterdar* yang bertugas di bidang finansial-moneter. *Defterdar* antara lain berwenang mengurus dan mengumpulkan zakat, pajak perdagangan investor asing, jizyah dari berbagai daerah yang dikuasai Usmani dan zakat. *Defterdar* ini berada dibawah pengawasan *sadrizam* (pemegang kekuasaan). Setiap bulan *defterdar* harus memberi laporan kinerjanya kepada *sadrizam*. Dalam pelaksanaan kekuasaan yang begitu luas didaerah kerajaan ini mengangkat gubernur (*pasha*) di tingkat satu dan bupati (*zanaziq*) di tingkat dua.



Dalam masalah-masalah agama, penguasa Usmani dibantu oleh para mufti dan kadi (*qadhi*). Mufti berperan sebagai penafsir hukum, sedangkan kadi berperan sebagai pelaksananya. Merekalah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan syariat Islam di dalam kehidupan Dinasti Usmani. Dia adalah pemimpin ulama yang memiliki kekuasaan keagamaan yang luas. *Syaikh al-Islam* dapat mengajukan permohonan kepada *sadrizam* untuk mengangkat, memberhentikan, atau mempromosikan pejabat-pejabat agama. *Sadrizam* menjadi representasi kekuasaan absolut sultan dalam masalah kenegaraan, sedangkan *Syaikh al-Islam* menjadi representasi kekuasaan absolute sultan di bidang keagamaan.



Di bidang militer, Turki Usmani mempunyai tentara yang tangguh, yang disebut dengan nama *Jenisseri*. Sistem rekrutmen tentara dilakukan pertama kali oleh Orkhan

³³Iqbal, *Fiqh*, h. 111.

dengan mengambil anak-anak tawanan Kristen dan mendidik mereka di barak-barak militer. Selain itu, mereka juga dibekali dengan pengetahuan keislaman. Sistem ini disebut dengan *devshirme*.

b. Pembaharuan pemerintah Usmani

Pada abad ke 19, Sultan Mahmud II mengadakan pembaharuan di bidang pemerintahan. Sultan mengganti *Jenisseri* dengan membentuk pasukan khusus yang terlatih, dinamakan dengan *mu'allam iskinji*. Pelatuhnya didatangkan langsung dari kalangan militer Mesir yang saat itu dipimpin oleh Muhammad Ali Pasha. Selain menghancurkan *jenisseri*, sultan juga menghapus tarekat Bektasyi yang selama ini menjadi penyangga korps *jenisseri* tersebut.

Sultan Mahmud II juga membentuk lembaga Perdana Menteri (*Baskevi*) sebagai ganti *sadrizam* yang membawahi para menteri kabinet untuk urusan-urusan dalam negeri, urusan luar negeri, urusan keuangan, dan juga urusan pendidikan. Para menteri tersebut memiliki kekuasaan semi otonom. Sedangkan Perdana Menteri bertugas sebagai mediator antara para menteri dan sultan. Selanjutnya, kekuasaan Perdana Menteri tidak lagi seluas tugas *sadrizam* sebelumnya.

Sultan Mahmud II juga mengembangkan demokrasi di kerajaan Usmani. Ia melanggar tradisi aristokrasi dan monarki yang selama ini berkembang. Pembesar-pembesar negara ia biasakan duduk bersama jika datang menghadap ke hadapan Sultan. Kekuasaan penguasa Usmani yang luar biasa luasnya juga ia batasi. Ia menghapuskan kekuasaan gubernur yang bisa menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang hanya melalui isyarat tangan. Kemudian hanya hakim pengadilan yang bisa menjatuhkan hukuman.

Di bidang pemerintahan, pada 1854, pembaharuan dilakukan dengan mengajak rakyat memberikan pendapat mereka tentang masalah-masalah kenegaraan. Wakil-wakil rakyat dari berbagai daerah di undang ke Istanbul. Namun karena masih asing, jadi sultan menjemput bola. Sultan sendiri yang menghampiri mereka ke daerah-dearah. Laporan ini akan dijadikan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dan pembaharuan.³⁴

Periode-periode kesultanan pada masa kerajaan Turki Usmani yaitu:

³⁴Iqbal, *Fiqh*, h. 115.

- a. Periode pertama (tahun 1299-1402 M), sultan-sultannya ialah:
- 1) Usman I (1299-1326 M.),
 - 2) Orkhan (1326-1359 M.),
 - 3) Murad I (1359- 1389 M.) dan
 - 4) Bayazid I (1389-1402 M.)
- b. Periode ke dua (1402-1566 M), sultan-sultannya ialah
- 1) Muhammad I (14033-1421 M.),
 - 2) Murad II (1421-1451 M.),
 - 3) Muhammad II fath (1451-1481 M.),
 - 4) Bayazid II (1481-1512 M.),
 - 5) Salim II (1512-1520 M.), dan
 - 6) Sulaeman I Qanuni (1520-1566 M.)³⁵
- c. Periode ke tiga (1566-1699 M), sultan-sultannya ialah
- 1) Salim II (1566-1699 M.),
 - 2) Murad III (1573-1596 M.),
 - 3) Muhammad III (1596-1603 M.),
 - 4) Ahmad I (1603-1617 M.),
 - 5) Mustafa I (1617-1618 M.),
 - 6) Usman II (1618-1622M.),
 - 7) Mustafa I yang kedua kalinya (1622-1623 M.),
 - 8) Murad IV (1623-1640 M.),
 - 9) Ibrahim I (1640-1648 M.),
 - 10) Muhammad IV (1648-1687 M.),
 - 11) Sulaeman III (1687-1691 M.),
 - 12) Ahmad II (1691- 1695 M.), dan
 - 13) Mustafa II (1695-1703 M.).
- d. Periode ke empat (1699-1839 M), sultan-sultannya ialah
- 1) Ahmad III (1703-1730 M.),
 - 2) Mahmud I (1730-1754 M.),
 - 3) Usman III (1754-1757 M.),
 - 4) Mustafa III (1757-1774 M.),
 - 5) Abdul Hamid I (1774-1788 M.),
 - 6) Salim III (1789-1807 M.),
 - 7) Mustafa IV (1807-1808 M.), dan
 - 8) Mahmud II (1808-1839 M.).

³⁵Syafik A. Mughani, *Sejarah Kebudayaan Islam Di Turki*, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1997), h. 54-66.

- e. Periode ke lima (1839-1922 M), sultan-sultannya ialah
- 1) Abdul Majid I (1839-1861 M.),
 - 2) Abdul Azis (1861-1876 M.),
 - 3) Murad V (1876 M.),
 - 4) Abdul Hamid II (1876- 1909 M.),
 - 5) Muhammad V (1909- 1918 M.),
 - 6) Muhammad VI (1918- 1922 M.), dan
 - 7) Abdul Majid II (1922- 1924 M).³⁶

Usaha Sultan Mahmud II memasukkan pengaruh-pengaruh Eropa yang dilakukan oleh gerakan Tanzimat mendapat perhatian besar dari Mustafa Kemal Attaturk. Kemal berusaha membuang semua yang berlabel agama pada Turki Usmani dan mengembangkan pola hidup dan prilaku Barat. Kemal melakukan sekularisasi besar-besaran di Turki. Puncaknya adalah dengan menggantikan Negara Usmani menjadi Republik Turki sekuler, yang memisahkan urusan agama dengan negara.³⁷

Berakhirnya ekspansi kerajaan Turki Usmani disebabkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang seringkali kehilangan kemampuan militer dan administrasinya, dan kerajaan dalam posisi tertekan dengan regresi ekonomi. Terjadinya pemberontakan dari rakyat dan beberapa kekalahan militer. Penyebab kejatuhan dinasti Turki Usmani adalah melemahnya sistem birokrasi, melemahnya kekuatan militer Turki Usmani, hancurnya perekonomian kerajaan, muncul dan menguatnya kekuatan baru di daratan eropa dan serangan balik terhadap kerajaan Turki Usmani.³⁸ Selain faktor-faktor tersebut, Perang Dunia I juga menjadi faktor pelengkap proses kehancuran Turki Ustmani pada tahun 1914 M.

D. Kesimpulan

Praktik politik dalam sejarah Islam era dinasti-dinasti Islam telah mengalami perjalanan yang sangat panjang dan dengan kebijakan-kebijakan dinasti masing-masing. Secara ringkasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Struktur pemerintahan Bani Umaiyah: kepemimpinan dipimpin oleh Khalifah, sebagai penjaganya diadakan *hajib*. Bani Umaiyah membagi departemen-departemen (*diwan*) menjadi: *diwan ar-rasail*, *diwan al-khatim*, *diwan al-jund*, *diwan al-kharaj*, dan *diwan al-*

³⁶Mughni, *Sejarah*, h. 54-66.

³⁷Iqbal, *Fiqh*, h. 116.

³⁸Mughni, *Sejarah*, h. 92.

barid. Dibawah *diwan al-jund* diangkat kepala daerah/gubernur dan hakim daerah/*qadhi*. Dan yang terakhir adalah rakyat.

Struktur pemerintahan Bani Abbasiyah: jabatan tertinggi adalah Khalifah, yang juga dijaga oleh *hajib*. Kemudian *wazir*, dibawah *wazir* itu dibentuk peradilan dan juga *katib-katib*, yaitu *katib kharaj*, *katib barid*, *katib amwal*, *katib mawali*, *katib baitul mal*, *katib syurthah*, dan *katib rasa'il*.

Struktur pemerintahan Turki Usmani: kedudukan tertinggi oleh kepala negara dan majelis syura (*mesrevet*), dibawah kepala negara dibentuk khalifah dan sultan. *Syaikh al-Islam* (mufti dan *qadhi*) berada dibawah pimpinan khalifah dan *sadrizam* (*bey* dan *defterder*) berada dibawah pimpinan sultan. Sedangkan rakyat tetap berada dibagian paling bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asari, Hasan, *Modernisasi Islam: Tokoh, Gagasan dan Gerakan*, Bandung: Citapustaka Media, 2002.
- Abbas, Nurlaelah, *Pemikiran Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyah*, Jurnal Tabligh Edisi Juni 2016 : 68 – 83.
- Black, Antony, *The History Of Islamic Political Thought: From The Prophet To The Present*, terj. Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Ibal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mufrodi, Ali, *Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Mughni, Syafik A., *Sejarah Kebudayaan Islam Di Turki*, Cet. I, Jakarta: Logos, 1997.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Cet. ke-12, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Sjadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sulaiman, Rusydi, *Pengantar Metodologi Studi Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sunanto, Musyirah, *Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Syalabi, A. *Sejarah Dan Kebudayaan Islam 2*, Jakarta : Al-Husna Zikra, 1995.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.

